

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai titik mula yang baik untuk penguatan SIDA sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan daya saing daerahnya. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sinkronisasi SIDA dengan kebijakan baik secara vertikal (dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah) maupun secara horizontal (antar kebijakan SIDA). Berdasarkan hasil penelitian juga telah diketahui bahwa terdapat keterpaduan konten antara dokumen-dokumen tersebut.

Namun demikian, secara konseptual SIDA masih terlalu *advance* untuk diterapkan sesuai dengan teori. Teori dasar yang mendasari kemunculan SIDA (*knowledge economy* dan *learning region*) merupakan teori-teori yang sangat luas dan dinamis untuk dapat diterapkan oleh suatu wilayah. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum cukup kuat menjadi basis pertumbuhan ekonomi. Terlihat pula dengan adanya gap antara SIDA berdasarkan teori dan operasionalisasi di Provinsi Jawa Tengah. SIDA dalam implementasinya masih terdapat beberapa keterbatasan salah satunya kebijakan. Proses terbentuknya SIDA juga masih belum didefinisikan secara jelas dan detail dalam kebijakan SIDA. Hal ini memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda-beda dari berbagai pihak yang terlibat.

Kebijakan SIDA Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah direspon oleh *stakeholder* namun, masih belum terdapat skema kerjasama yang baik sehingga pada implementasinya *stakeholder* SIDA masih terfokus pada peran masing-masing. Kondisi ini berakibat pada munculnya celah yaitu belum bertemunya penemu dan pengguna iptek. Diperkuat oleh dokumen *roadmap* SIDA, penerapan SIDA di Provinsi Jawa Tengah saat ini mempunyai kendala mengenai belum optimalnya kerjasama antar *stakeholder*. Oleh karena itu, nantinya pada tahap pengembangan SIDA penting untuk melakukan penguatan jejaring.

Sementara itu, dari segi kebijakan masih terdapat beberapa permasalahan yang belum diikuti oleh pendekatan kebijakan yang seharusnya dilakukan terutama dalam hal pembangkitan dan difusi pengetahuan. Kondisi seperti ini dapat memicu kebocoran manfaat serta akumulasi masalah kebijakan yang tidak terselesaikan. Sementara kebijakan merupakan kunci keberhasilan SIDA dan ilmu pengetahuan merupakan komposisi utama dalam penciptaan inovasi, sehingga permasalahan tersebut akan berujung pada implementasi SIDA yang tidak berjalan dengan baik.

Berbagai temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengarah pada temuan utama penelitian yaitu adanya *missmatch* dalam proses penerjemahan konsep SIDA dalam implementasi yang dilakukan oleh *stakeholder* SIDA. hal ini merupakan kelemahan dalam penelitian ini, karena terdapat perbedaan interpretasi dalam mengimplementasikan konsep SIDA oleh para pemangku kepentingan. Bukan hal yang tidak mungkin apabila peneliti juga mempunyai interpretasi yang berbeda dalam menerjemahkan konsep SIDA untuk diimplementasikan.

## 5.2 Rekomendasi

Hasil analisis penelitian kebijakan SIDA dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah ini masih berupa langkah awal untuk mengidentifikasi kebijakan yang relatif efektif untuk menunjang pengembangan SIDA. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan yaitu:

- a. Pemantapan terhadap pemahaman konsep SIDA perlu dilakukan jika Provinsi Jawa Tengah berkeinginan untuk menggunakan SIDA sebagai salah satu instrumen peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Tahap konseptualisasi SIDA merupakan pondasi implementasi SIDA. Sehingga perlu diperkuat pada tahapan ini agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Perbedaan pemahaman/ interpretasi terhadap konsep dasar SIDA akan berdampak pada tumpang tindih program yang akan dilaksanakan sebagai bentuk implementasi SIDA.

- b. Sebagai wilayah dengan “pengalaman” penerapan SIDA yang sudah cukup baik, Provinsi Jawa Tengah perlu mempersiapkan instrumen untuk pengembangan SIDA yang berkelanjutan. Instrumen-instrumen tersebut diantaranya yaitu kebijakan SIDA, penguatan lembaga dan jejaring, penciptaan dan penerapan iptek. Terdapat dua hal penting untuk disiapkan dengan baik yaitu pengoptimalan peran iptek dan penguatan jejaring antar pemangku kepentingan.
- c. Perlu dilakukan evaluasi kebijakan SIDA oleh *stakeholder* terkait yang mempertimbangkan permasalahan kebijakan serta pendekatan kebijakan yang digunakan. Sehingga kebijakan yang diterapkan akan lebih efektif untuk menunjang pengembangan SIDA Provinsi Jawa Tengah.
- d. Perlu adanya studi lebih lanjut mengenai kesiapan Provinsi Jawa Tengah dalam mengadopsi konsep sistem inovasi daerah dalam rangka menghadapi fenomena revolusi industri 4.0. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat secara nasional kebijakan konseptualisasi SIDA sudah diperbarui dengan UU No.11 Tahun 2019, sehingga bisa menjadi peluang bagi Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari entitas sistem inovasi nasional untuk mengembangkan SIDA dengan lebih baik.